

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia termasuk negara yang sedang berkembang oleh karena itu Permasalahan umum yang sering dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang berada di bawah garis kemiskinan (poverty line) (Tambunan,2001)

Menurut Hajiji (2010), ketimpangan pendapatan dapat ditentukan oleh tingkat pembangunan suatu negara, heterogenitas etnis, dan adanya kediktatoran dan pemerintahan yang gagal di suatu negara. Ketimpangan pendapatan akan terjadi pada tahap awal pertumbuhan ekonomi. Pada masa ini distribusi pendapatan akan memburuk, namun, di tahap selanjutnya, distribusi pendapatan akan mengalami peningkatan dan ketimpangan akan terkikis, sehingga nantinya akan menciptakan masyarakat yang lebih setara. Ketimpangan memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari adanya ketimpangan adalah dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya guna meningkatkan kesejahteraan. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan yang

ekstrim antara lain inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro,2006).

Ketimpangan selama ini berlangsung dengan berwujud dalam berbagai bentuk, aspek, dan dimensi. Seperti ketimpangan hasil pembangunan misalnya dalam hal pendapatan perkapita atau pendapatan daerah, dan ketimpangan kegiatan atau proses pembangunan itu sendiri. Perbedaan karakteristik alam, sosial, ekonomi, dan sumber daya alam yang penyebarannya berbeda disetiap wilayah. Perbedaan tersebut menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan ekonomi dikarenakan terkonsentrasinya suatu kegiatan perekonomian yang berdampak meningkatnya ekonomi di beberapa wilayah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan alam yang dimiliki seharusnya dapat menjadikan nilai tambah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Kelebihan yang dimiliki tersebut diharapkan memberikan dampak menyebar (trickle down effect). Hanya saja kekayaan alam ini tidak dimiliki oleh seluruh Provinsi di Indonesia secara merata. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab timbulnya ketimpangan atau kesenjangan antar wilayah (Kuncoro, 2003).

Provinsi Sumatera Utara tidak terlepas dari masalah ketimpangan regional. Hal ini dikarenakan perbedaan karakteristik antar kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara yang memiliki pengaruh kuat terciptanya pola pembangunan ekonomi di provinsi Sumatera Utara, hingga suatu kewajaran bila pola pembangunan ekonomi antar wilayah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara belum merata.

Ketidak merataan ini berpengaruh pada kemampuan untuk berkembang yang mengakibatkan beberapa kabupaten/kota mampu berkembang dengan cepat sementara kabupaten/kota lainnya berkembang lambat. Kemampuan berkembang ini kemudian menyebabkan terjadinya ketimpangan baik pembangunan maupun pendapatan antar kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Provinsi Sumatera Utara merupakan Provinsi keempat terbesar di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 25 kabupaten, 8 kota, 450 kecamatan, 693 kelurahan, dan 5.417 desa dan jumlah penduduk Sumatera Utara pada tahun 2022 menurut badan pusat statistik mencapai 15.115.206 jiwa.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Jika semakin besar PDRB perkapita semakin baik kesejahteraan masyarakatnya. Besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2022 di Sumatera Utara mencapai Rp955,19 triliun dan PDRB per kapita mencapai Rp63,19 juta. Tabel 1.1 di bawah merupakan jumlah PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menurut Kabupaten di wilayah Sumatera Utara pada tahun 2018-2022 .

**Table 1.1**  
**Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Menurut Kabupaten Di Wilayah Sumatera Utara Tahun 2018-2022 (Milyar**  
**Rupiah)**

Kabupaten	Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten Di Wilayah Sumatera Utara (Milyar Rupiah)					
	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
Nias	24 636 473	26 611 574	27 619 440	28 565 862	30 393 638,19	4,28%
Mandailing	28 451 718	30 169 003	29 379 369	31 126 553	33 830 497,56	3,52%
Natal						
Tapanuli Selatan	45 961 324	49 397 036	48 806 866	50 945 707	55 487 218,95	3,83%
Tapanuli Tengah	24 934 361	26 119 495	27 867 949	28 753 713	31 049 490,02	4,48%
Tapanuli Utara	24 332 249	26 071 315	26 524 531	27 917 074	30 291 797,92	4,47%
Toba Samosir	39 204 402	41 812 686	38 204 189	39 597 467	42 161 712,84	1,46%
Labuhan Batu	64 345 055	67 295 287	70 449 184	75 216 464	82 297 309,45	5,04%
Asahan	47 854 663	51 146 769	50 416 672	54 003 135	59 129 668,11	4,32%
Simalungun	41 038 393	43 832 797	40 010 292	42 418 784	46 285 430,28	2,43%
Dairi	30 228 407	32 272 154	30 271 338	31 157 809	33 972 435,30	2,36%
Karo	46 917 382	49 028 529	51 961 249	53 349 721	57 852 049,99	4,27%
Deli Serdang	46 882 094	49 166 871	57 121 603	59 394 175	65 275 058,35	6,84%
Langkat	38 504 178	40 770 602	41 997 095	44 756 262	49 438 868,74	5,13%
Nias Selatan	19 694 732	21 362 077	19 975 206	20 265 918	21 447 849,70	1,72%
Humbang Hasundutan	29 325 411	31 169 378	31 066 971	31 828 353	34 204 247,53	3,12%
Pakpak Bharat	22 589 017	23 767 278	23 282 247	23 834 097	25 519 226,85	2,47%
Samosir	32 469 661	35 152 678	33 395 960	34 534 288	37 077 364,13	2,69%
Serdang Berdagai	42 294 269	45 450 612	43 601 239	45 944 656	50 176 775,18	3,48%
Batu Bara	77 415 555	81 396 934	85 362 158	90 029 827	98 150 709,02	4,86%
Padang Lawas Utara	40 154 176	42 096 054	46 921 625	49 849 624	53 784 663,76	6,02%

Padang Lawas	38 458 403	39 891 069	46 121 233	49 822 507	54 575 865,34	7,25%
Labuhan Batu Selatan	75 465 242	79 036 333	90 032 146	97 078 029	106 625 839,28	7,16%
Labuhan Batu Utara	63 032 129	66 758 160	66 167 204	71 009 862	77 457 956,83	4,20%
Nias Utara	23 724 681	25 449 555	25 276 857	26 043 861	27 675 665,99	3,13%
Nias Barat	20 490 439	22 185 630	21 408 363	22 298 150	23 780 110	3,02%

Sumber : Data diolah (BPS SUMUT )

Tabel 1.1 Menunjukkan tingkat perolehan PDRB perkapita dari 25 Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun nilai PDRB perkapita antar kabupaten belum merata, apabila dilihat pada tabel hanya ada dua Kabupaten yang memiliki rata-rata PDRB Per Kapita sangat jauh jaraknya dari Kabupaten lainnya pada tahun 2022 yaitu Kabupaten Labuhan Batu Selatan Rp. 106.625.839,28 Milyar Rupiah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 7,16% dan Kabupaten Batu Bara Rp. 98.150.709,02 Milyar Rupiah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 4,86% pada rentang tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Tingginya PDRB Per Kapita di Kabupaten Labuhan Batu Selatan disebabkan pendapatan dari sektor perindustrian mencapai 43,95% dan Kabupaten Batu Bara disebabkan pendapatan dari sektor pertanian yaitu komoditas cabai merah mencapai 1.500 Hektar dengan produksi mencapai 63.800 ton pada tahun 2022. Selain itu ada dua Kabupaten yang memiliki rata-rata PDRB Per Kapita sangat rendah dari Kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Nias Selatan Rp. 21.447.849,70 Milyar Rupiah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 1,72% dan Kabupaten Nias Barat Rp.

23.780.110 Milyar Rupiah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 3,02% pada rentang tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik mengenai jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018 jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Utara berjumlah 14.415.391 Jiwa, pada tahun 2019 jumlah penduduk Provinsi Sumatera utara berjumlah 14.562.549 Jiwa presentase kenaikan jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 sebesar 0.5%. pada tahun 2020 jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Utara berjumlah 14.703.532 Jiwa, presentase kenaikan jumlah penduduk pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 sebesar 0.48%. pada tahun 2021 jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Utara berjumlah 14.936.148 Jiwa, presentase kenaikan jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 sebesar 0.78%. pada tahun 2022 jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Utara berjumlah 15.115.206 Jiwa, presentase kenaikan jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 sebesar 0.59%. Berdasarkan presentase kenaikan jumlah penduduk di Provonsi Sumatera Utara pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan pada setiap tahunnya.

Data PDRB memperlihatkan terdapat beberapa Kabupaten yang mengalami penurunan PDRB berdasarkan harga berlaku antara lain Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Asahan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Nias

Selatan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Berdagai, Kabupaten Nias Utara, hal ini disebabkan adanya dampak Covid-19.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Mengukur Ketimpangan Regional Antar Kabupaten Di Provinsi Sumatera Utara”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di sampaikan dapat di identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih terdapat ketimpangan regional antar Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara
2. Masih terdapat ketimpangan distribusi pendapatan antar Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara
3. Masih terdapat ketimpangan pembangunan antar Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara

## **1.3 Batasan dan Rumusan Masalah**

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui apakah terjadi ketimpangan regional antar Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Sedangkan rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah mengukur ketimpangan regional antar Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi, batasan masalah dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah terjadi ketimpangan regional antar Kabupaten di Sumatera Utara
2. Untuk mengetahui apakah terjadi ketimpangan distribusi pendapatan antar Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara
3. Untuk mengetahui apakah terdapat ketimpangan pembangunan antar Kabupaten di Sumatera Utara

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang di harapkan dari penelitian mengukur ketimpangan regional antar Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Provinsi dalam melakukan perencanaan pembangunan, distribusi pendapatan agar tidak terjadi ketimpangan regional antar wilayah Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.

2. Bagi peneliti



Menambah pengetahuan serta wawasan mengenai ketimpangan dan pembangunan antar wilayah Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dukungan referensi untuk penelitian selanjutnya pada ruang lingkup dan kajian yang sama.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 URAIAN TEORITIS**

##### **2.1.1 Pengertian PDRB Dan PDB**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Menghitung PDRB bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur

ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

PDB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh factor-factor produksi yang ikut serta dalam proses produksi disuatu Negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). PDB atas jasa harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. PDB atas harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh factor harga disuatu wilayah.

PDB/GDP artinya mengukur nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang di produksi oleh sumber daya yang berada dalam suatu Negara selama jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. GDP juga dapat digunakan untuk mempelajari perekonomian dari waktu ke waktu untuk membandingkan beberapa perekonomian pada suatu saat (McEachern, 2000 : 146).

PDB sebagai pendapatan nasional menggambarkan tingkat produksi Negara yang dicapai dalam suatu tahun tertentu dan perubahannya dari tahun ke tahun. Maka ia mempunyai peranan penting dalam menggambarkan (i) tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai, dan (ii) perubahan pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Produk nasional atau pendapatan nasional adalah istilah yang menerapkan tentang nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi sesuatu Negara dalam suatu tahun tertentu (Sukirno, 2004 : 17).

Dari pengertian diatas PDB ialah pendapatan total dan pengeluaran total nasional atas output barang dan jasa dalam periode tertentu biasanya satu tahun. PDB mencerminkan kinerja ekonomi dengan demikian semakin tinggi tingkat PDB maka semakin bagus kinerja ekonomi.

### **3.1.2 Pengertian Ketimpangan**

Kesenjangan regional menurut Murty dalam Abel (2006:25) diartikan sebagai ketidak seimbangan pertumbuhan antar sektor primer, sekunder, tersier atau sektor social disuatu Negara, distrik, ataupun tempat dimana peristiwa itu terjadi. Disetiap Negara baik Negara maju maupun Negara berkembang mempunyai eilayah yang maju dan tertinggal secara ekonomi penting untuk menghubungkan pola pembangunan ekonomi regional melalui beragam variable fisik dan sosial ekonomi untuk mengidentifikasi variable

yang mempunyai pengaruh terbedar terhadap pola pertumbuhan. Terdapat aspek – aspek umum yang dapat memberikan beberapa generalisasi.

Ketimpangan distribusi pendapatan adalah kondisi dimana hasil dari pembangunan suatu Negara belum dapat nikmati oleh rakyatnya secara merata (Chirsamba & Saraswati, 2016). Ketimpangan distribusi pendapatan adalah belum meratanya pendapatan diseluruh kalangan masyarakat baik itu di dalam bentuk kepemilikan individu, maupun kepemilikan factor produksi (Tadaro, 2011).

Ketimpangan pendapatan merupakan kondisi dimana distribusi pendapatan yang di terima masyarakat tidak merata. Ketimpangan awalnya disebabkan oleh perbedaan sumber daya alam dan kondisi geografi yang terdapat di masing-masing wilayah. Terjadinya ketimpangan antar wilayah membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan ketimpangan menyebabkan kebijakan retribusi pendapatan yang tentunya akan mahal (Wijayanto, 2016).

Irma Adelman dan Cynthia Taft Morris tahun 1973 (dalam Arsyad, 2002) menyatakan bahwa factor penyebab ketimpangan pendapatan di Negara sedang berkembang ialah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan turunnya pendapatan perkapita.
2. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.

3. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (*capital intensive*), sehingga presentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan presentase pendapatan yang berasal dari kerja sehingga pengangguran bertambah dan rendahnya mobilitas social.
4. Hancurnya industri-industri kerajinan masyarakat seperti pertukangan, industri rumah tangga dan lainnya.
5. Inflasi, dimana penerimaan pendapatan uang yang bertambah tetapi tidak diikuti secara proposional dengan penambahan produksi barang-barang.
6. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang meyebabkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi golongan kapitalis.
7. Memburuknya nilai tukar bagi mata uang Negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan Negara maju sebagai akibatnya ketidakselarasan barang-barang ekspor dari Negara sedang berkembang.

Menurut Harmony (2021), tujuan distribusi pendapatan bukan hanya memperkecil kesenjangan social saja, tetapi juga memiliki tujuan, antara lain :

1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik, tidak ada masyarakat yang berada dibawah garis kesjahteraan;
2. Memberikan hak dan keadilan setiap warga Negara, setiap masyarakat bisa memiliki hak untuk menikmati fasilitas Negara;
3. Meminimalisir resiko kriminalitas terutama perampokan, penipuan, maupun pencucian uang. Masyarakat yang memiliki perbedaan distribusi pendapatan, besar kemungkinan melakukan tindak kejahatan;
4. Menimbulkan rasa solidaritas dan social yang tinggi antar lapisan masyarakat.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan adalah perbedaan pendapatan yang dihasilkan masyarakat sehingga terjadi perbedaan yang mencolok dan menyebabkan menurunkan daya beli masyarakat atas barang atau jasa. Jika daya beli masyarakat lemah maka akan menghambat aktivitas perekonomian dalam menghasilkan output, jika peningkatan output melambat maka akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi juga lambat.

### **3.1.3 Pengertian Wilayah**

Berdasarkan tingkat kemajuan wilayah-wilayah dalam suatu Negara dapat di kelompokkan sebagai berikut (Hanafi, 1998:23) :

- a. Wilayah terlalu maju terutama kota besar yang mana terdapat batas pertumbuhan atau Polaris, seumpamanya dalam menghadapi masalah diseconomies of scale yang menyebabkan masalah manajemen, kenaikan biaya produksi, kenaikan biaya fasilitas pelayanan umum, kenaikan gaji dan upah, kenaikan harga bahan baku energy, peningkatan ongkos sosial.
- b. Wilayah netral sebagai wilayah dengan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi, tidak ada tekanan ongkos social dan merupakan kota satelit bagi wilayah yang terlalu padat.
- c. Wilayah sedang dengan pola distribusi pendapatan dan kesempatan kerja yang relative baik yang merupakan gambaran antara wilayah maju dan wilayah kurang maju dimana pengangguran dan kelompok masyarakat miskin.
- d. Wilayah kurang berkembang adalah wilayah tanpa tanda-tanda untuk mengejar pertumbuhan dan pembangunan nasional seperti daerah konsentrasi industri yang memudar.
- e. Wilayah tidak berkembang adalah wilayah miskin yang mana insudtri modern tidak dapat berkembang dalam bebagai skala yang di tandai dengan daerah pertanian subsisten dan kecil, penduduk yang sedikit dan tidak terdapat kota dan konsentrasi pemukiman yang relative besar.



Wilayah dapat dibedakan menjadi geografi atau region berdasarkan unsur fisik, wilayah geologi (geological region), wilayah jenis tanah (soil region), wilayah iklim (climatic region), wilayah vegetasi (vegetation region). Berdasarkan unsur social budaya yaitu wilayah bahasa (linguistic region), wilayah ekonomi (economic region), wilayah sejarah (historical region), dan wilayah politik (political region) seperti batas-batas Negara di dunia.

Berdasarkan kekhasannya wilayah dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

- a. Wilayah yang didasarkan atas konsep homogenitas yang disebut wilayah formal (homogeneous / uniform region).
- b. Wilayah yang didasarkan atas konsep heterogenitas yang disebut wilayah fungsional (rodal region / organic region).

#### **3.1.4 Pengukuran Ketimpangan**

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam mengukur ketimpangan pendapatan, antara lain :

##### **A. Indeks Williamson**

Indeks Williamson merupakan variasi tertimbang yang dibuat oleh Williamson pada tahun 1965. Indeks Williamson sangat sensitif untuk mengukur perbedaan daerah dan mencermati tren kesenjangan yang terjadi.

Formulasi Indeks Williamson :

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y}$$

Keterangan :

$Y_i$  : PDRB per kapita di kabupaten/kota i,

$Y$  : PDRB per kapita rata-rata Sumatera Utara,

$f_i$  : Jumlah penduduk di Kabupaten/kota

$n$  : Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara

Angka indeks ketimpangan Williamson yang semakin kecil atau mendekati nol menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil atau pembangunan antar wilayah semakin melebar. Indeks ketimpangan Williamson yang diperoleh terletak antara 0 sampai 1

- a. Jika ketimpangan Williamson mendekati 0 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar Kabupaten adalah rendah atau pertumbuhan ekonomi antar daerah merata.
- b. Jika ketimpangan Williamson mendekati 1 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar Kabupaten adalah tinggi atau pertumbuhan ekonomi antar daerah tidak merata.

Apabila angka indeks kesenjangan Williamson semakin mendekati nol, maka menunjukkan kesenjangan yang semakin kecil dan bila angka indeks menunjukkan semakin mendekati satu maka menunjukkan

kesenjangan yang makin melebar. Motolla dalam Puspandika (2007) menetapkan sebuah kriteria yang digunakan level rendah, sedang, atau tinggi.

Berikut adalah kriterianya :

- a. Kesenjangan level rendah, jika  $IW < 0,35$
- b. Kesenjangan level sedang, jika  $0,35 \leq IW \leq 0,5$
- c. Kesenjangan level tinggi, jika  $IW > 0,5$

## **B. Indeks Theil**

Indeks Theil adalah indeks yang banyak digunakan dalam menghitung dan menganalisis distribusi pendapatan regional. Karakter utama indeks ini yaitu kemampuan untuk melihat terjadinya kesenjangan antar kelompok wilayah (between inequality) dan kesenjangan dalam suatu kelompok wilayah (within inequality) itu sendiri. Nilainya berkisar antara nol sampai dengan satu, dimana nol menyatakan bahwa distribusi PDRB ADHK merata sempurna antar kelompok wilayah, sedangkan apabila mendekati satu artinya distribusi PDRB ADHK tidak merata antar kelompok wilayah.

Kelebihan Indeks Theil :

- a. Sifatnya tidak sensitif terhadap skala daerah dan tidak terpengaruh oleh nilai-nilai ekstrim
- b. Independen terhadap jumlah daerah sehingga dapat digunakan sebagai pembanding dari sistem regional yang berbeda-beda.

- c. Dapat didekomposisikan ke dalam indeks ketidak merataan antar kelompok dan intra kelompok daerah secara simultan.

Formulasi indeks Theil

$$I(y) = \sum (y_j/Y) \times \log [(y_i/Y) / (x_j/X)]$$

$I(y)$  : Indeks Entropi Theil

$y_j$  : PDRB per kapita Kabupaten/kota,

$Y$  : Jumlah PDRB per kapita Provinsi Sumatera Utara,

$x_j$  : Jumlah penduduk Kabupaten/kota

$X$  : Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara

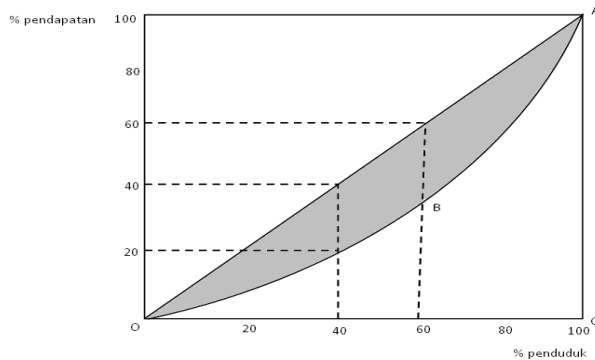
Indeks Entropi Theil Bila Indeks mendekati 1 artinya sangat timpang dan sebaliknya apabila indeks mendekati 0 berarti sangat merata (Sjafrizal, 2012).. Indeks ketimpangan entropi theil tidak memiliki batas atas atau bawah, hanya apabila semakin besar nilainya, maka semakin timpang dan semakin kecil nilainya maka semakin merata.

### **C. Kurva Lorenz**

Kurva Lorenz digunakan untuk menggambarkan bentuk ketimpangan terhadap distribusi pendapatan masyarakat. Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif aktual antara persentase penerimaan pendapatan dengan presentase pendapatan total yang benar diterima selama periode tertentu misalnya satu tahun.

Gambar 2.1

## Kurva Lorenz



Kurva ini digambarkan pada sebuah bidang persegi / bujur sangkar dengan bantuan garis diagonalnya. Garis horizontal menunjukkan persentase pendapatan. Semakin dekat kurva dengan garis diagonalnya, maka ketimpangan semakin rendah dan jika kurva semakin melebar menjauhi garis diagonalnya maka ketimpangan semakin tinggi.

### 3.2 Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu adalah hal yang sangat bermanfaat untuk perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran mengenai hasil – hasil penelitian terdahulu yang menyangkut mengenai judul yang diteliti oleh penulis. Dalam hal ini didasarkan untuk melakukan penelitian perlu ada bentuk hasil penelitian yang dijadikan referensi pembanding dalam penelitian. Adapun penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2,1

## Penelitian terdahulu

No	Nama peneliti / judul penelitian	Alat analisis	Hasil penelitian
1	Mutiara Risky Ritonga Judul : Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah Kabupaten Di Provinsi Sumatera Utara	Gini Ratio	Hasil analisis berdasarkan perhitungan gini ratio serta data pembangunan wilayah Kabupaten di seluruh Provinsi Sumatera Utara. Maka, pada tahun 2017 – 2021 tidak terdapat ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah Kabupaten, pada tahun 2017 nilai gini ratio sebesar 0,01138 yang berarti tidak terdapat ketimpangan distribusi pendapatan, pada tahun 2018 nilai gini ratio sebesar 0,2128 yang berarti tidak terdapat ketimpangan distribusi pendapatan, pada tahun 2019 nilai gini ratio sebesar 0,208 yang berarti tidak terdapat ketimpangan distribusi pendapatan, pada tahun 2020 nilai gini ratio sebesar 0,420174 yang berarti tidak terdapat ketimpangan distribusi pendapatan, pada tahun 2021 nilai gini ratio sebesar 0,23076 yang berarti tidak terdapat ketimpangan distribusi pendapatan.
2	Tutik Yuliani Judul : Pertumbuhan Ekonomi Dan	- Indeks Williamson - Indeks Entropi	Hasil analisis tentang ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di

	Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten Di Kalimantan Timur	Theil	Propinsi Kalimantan Timur tahun 2010-2012 dengan menggunakan Indeks Williamsom menunjukkan bahwa nilai Indeks Williamson mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2010 nilai indek williamson sebesar 0,69, kemudian ditahun 2011 ketimpangan tidak mengalami peningkatan dan pada tahun 2012 ketimpangannya menigkat menjadi 0.72. Peningkatan ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota disebabkan oleh perbedaan kandungan sumber daya alam, perbedaan kondisi demografis, konsentrasi kegiatan ekonomi, dan alokasi dana pembangunan antar wilayah.
3	Nanda Puji Hapsari Judul : Ketimpangan Ekonomi Dipulau Jawa Dan Factor-Faktor Yang Mempengaruhinya	- Analisi Regresi Data Panel Dengan Model Ekonometrik	1. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 99,49% variasi variabel dependen ketimpangan wilayah dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yakni Indeks Pembangunan Manusia, Ekspor, Tenaga Kerja, dan Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan sisanya dapat dijelaskan oleh faktor-faktor diluar model. 2. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah di Pulau Jawa. Artinya

			<p>semakin tinggi angka indeks maka ketimpangan akan semakin meningkat.</p> <p>3. Ekspor berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Pulau Jawa. Artinya, peningkatan jumlah ekspor akan mengurangi tingkat ketimpangan wilayah di Pulau Jawa</p> <p>4. Tenaga Kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Pulau Jawa. Artinya peningkatan tenaga kerja akan mengurangi tingkat ketimpangan wilayah di Pulau Jawa.</p> <p>5. Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Pulau Jawa. Artinya tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan Pulau Jawa.</p>
4	<p>Afif Ilham Hamzaki</p> <p>Judul : Analisis Tingkat Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Riau (Dengan Pendekatan Gini Ratio)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gini ratio</li> <li>- Distribusi ukuran (<i>size distribution</i>)</li> <li>- Kurva lorenz</li> </ul>	<p>Indeks Gini Rasio Provinsi Riau sejak tahun 2010-2020 berada di angka lebih dari 0,3, angka ini menunjukkan bahwa Provinsi Riau memiliki tingkat ketimpangan yang relatif sedang. Akan tetapi angka ini peringatan dini untuk Provinsi Riau agar bisa mengantisipasi kesenjangan distribusi pendapatan yang</p>



			ada di kalangan masyarakatnya. Angka kesenjangan yang relatif tinggi dapat menyebabkan terjadinya kecemburuan-kecemburuan sosial diantara masyarakat, sehingga bisa menyebabkan adanya konflik sosial serta tindakan kriminal lainnya
5	Muhammad Fandi Attala Judul : Analisis Ketimpangan Pendapatan Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2015-2020	Ordinary Least Squeres, Alat Eviews	<p>1. Hasil dari analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PDRB tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatn dengan nilai probabilitas sebesar <math>0,8724 &gt; 0,05</math> (<math>\alpha=5\%</math>). Artinya apabila variabel laju pertumbuhan PDRB mengalami peningkatan atau penurunan sebesar 1 persen maka tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.</p> <p>2. Hasil penelitian diketahui bahwa IPM memberikan pengaruh yang signifikan pada ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa. Nilai probabilitas dari IPM sebesar <math>0,0027 &lt; 0,05</math> (<math>\alpha=5\%</math>). Hal ini sesuai dengan hipotesis bahwa IPM berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.</p> <p>3. Hasil estimasi menunjukkan bahwa jumlah penduduk memiliki koefisien sebesar</p>

			0,393151 dan nilai probabilitas dari variabel jumlah penduduk sebesar 0.6973 atau lebih besar dari 0,05 ( $\alpha=5\%$ ), sehingga gagal menolak $H_0$ . Artinya variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.
6	Andi Samsir, Abdul Rahman Judul : Menelusuri Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Selatan	- Regresi panel - Indeks Williamson	Selama periode penelitian 2010-2015, terjadi ketimpangan pembangunan yang tidak cukup signifikan berdasarkan Indeks Williamson, sedangkan menurut Indeks Entropy Theil, ketimpangan pembangunan boleh dikatakan kecil yang berarti masih terjadinya pemerataan pembangunan setiap tahunnya selama periode pengamatan. Sebagai akibatnya tidak terbuktinya hipotesis Kuznets di Kabupaten / kota di Provinsi Sumatera Selatan yang mengatakan adanya kurva U terbalik

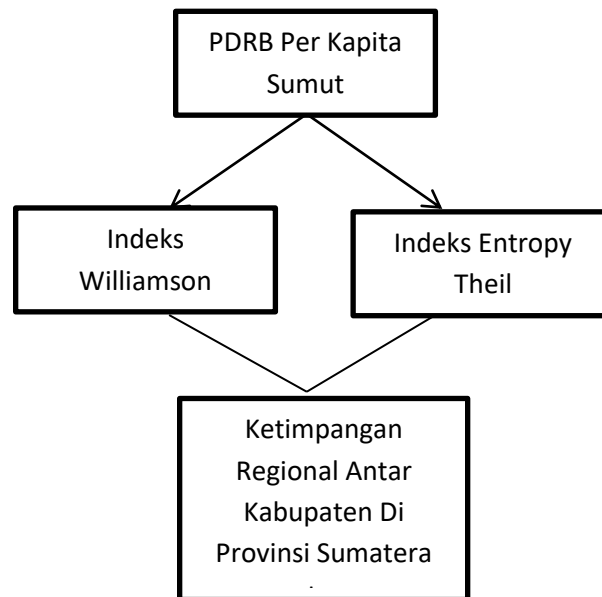
Keterbaruan peneliti ini dibanding dengan penelitian sebelumnya khususnya dari penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Risky Ritonga yang meneliti dengan wilayah yang sama, penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Risky Ritonga menggunakan PDRB atas dasar harga konstan, lalu didalam penelitian ini dilakukan perubahan PDRB atas dasar harga konstan menjadi

PDRB atas dasar harga berlaku dan tahun serta penambahan jumlah variabel dan metode pengukuran ketimpangan yang berbeda. Pada penelitian yang dilakukan oleh Tutik Yuliani menggunakan PDRB Per Kapita atas dasar harga konstan dari tahun 2010 – 2012, lalu didalam penelitian ini dilakukan perubahan dengan menggunakan PDRB Per Kapita atas dasar harga berlaku dari tahun 2018 - 2022. Metode yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Tutik Yuliani menggunakan Indeks Williamson dan Indeks Entropy Theil yang mana digunakan peneliti dalam mengukur ketimpangan regional antar Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, serta perbaruan tahun yang dilakukan dalam penelitian ini. Pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fandi Attala penelitian dengan variabel yang sama yaitu PDRB tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan dengan nilai probabilitas sebesar  $0,8724 > 0,05$  ( $\alpha = 5\%$ ), dapat diartikan bahwa adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi belum mampu menurunkan ketimpangan pendapatan yang ada di Provinsi di Pulau Jawa. Hal ini sejalan dengan penelitian ini dimana pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tetapi belum signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara. Hanya saja dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat pengukur ketimpangan yang berbeda serta tahun yang terbaru.

### 3.3 Kerangka Konseptual

Gambar 2.2

Kerangka Konseptual



### 3.4 Hipotesis

Berdasarkan data PDRB Per Kapita dan jumlah penduduk dapat diperkirakan terdapat ketimpangan regional antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 di wilayah Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.